



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/28/K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/164/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya pegawai yang pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/164/K/411.101.03/2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagai berikut :

Halaman 3 (tiga) Nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis dr. Palgunadi, MS, IV/c, NIP. 140 091 654 diubah dan diganti dr. Koorniadji Dwi Purwo, IV/b, NIP. 140 163 528.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 14 - 4 - 2008

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. SY

Pembina